

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, dan Peran BPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem

Ni Luh Sekarrini*, Sunitha Devi

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* sekarrini@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
18 Juli 2024

Tanggal diterima:
17 Agustus 2024

Tanggal dipublikasi:
29 Agustus 2024

Kata kunci: sistem akuntansi keuangan; kompetensi aparatur desa; peran BPD; kualitas laporan keuangan.

Pengutipan:

Sekarrini, N. L. & Devi, S. (2024). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, dan Peran BPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (2), 202-211.

Keywords: financial accounting system; competency of village officials; role of BPD; quality of financial reports.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari pengaruh sistem akuntansi keuangan, kompetensi aparatur desa, dan peran Bpd terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Karangasem. Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Riset ini mempergunakan populasi yang terdiri dari seluruh kepala desa, bendahara/kaur keuangan, sekretaris desa, dan anggota Bpd yang terdapat pada kedelapan pemerintah desa di Kecamatan Karangasem. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik Sampling Jenuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 responden. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan kuesioner dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah (1) sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (2) kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan, (3) peran BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini dapat menjadi saran bagi pemerintah desa untuk dapat terus meningkatkan penerapan sistem akuntansi keuangan desa serta selalu menerapkan peraturan yang berlaku sebagai panduan dalam pengelolaan keuangan desa.

Abstract

This research aims to see the influence of the financial accounting system, the competence of village officials, and the role of Bpd on the quality of village government financial reports in Karangasem District. The research design used in this research is quantitative. This research uses a population consisting of all village heads, treasurers/financial heads, village secretaries and Bpd members in eight village governments in Karangasem District. Determination of the sample in this study used a non-probability sampling method with the Saturated Sampling technique. The number of samples in this study was 34 respondents. The instrument used in data collection was a questionnaire and the analysis technique used was multiple regression analysis. The results of this research are (1) the financial accounting system has a positive and significant effect on the quality of financial reports, (2) the competence of village officials has a positive and significant effect on the quality of financial reports and, (3) the role of BPD has a positive and significant effect on the quality of financial reports. The results of this study can be a suggestion for the village government to continue to improve the implementation of the village financial accounting system and always apply the applicable regulations as a guide in managing village finances.

Pendahuluan

Pemerintah desa mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena merupakan pemerintah terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa sering disebut sebagai salah satu pemimpin pembangunan daerah, yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengelola potensi desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahun 2014 Nomor 113 tentang Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan segala hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keseluruhan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan desanya.

Sejalan dengan itu, Jauhari & Hazisma (2021) menyatakan bahwa kualitas data adalah ukuran kemunculan data yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi, dimana kenyataannya data atau data yang sama sesuai dengan kenyataan. Kualitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) selain kualitas data, juga merupakan seperangkat aplikasi terintegrasi atau biasa disebut aplikasi keuangan desa yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan implementasi berbagai peraturan di bidang pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan terkendali (Rahayu & Kanita, 2023).

Upaya untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi penataan finansial desa, pemerintah desa harus melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pengawasan, dan pertanggungjawabkan oleh kepala desa sebanding dengan peraturan yang telah diberlakukan (Laksmi & Sujana, 2019). Dimana pengelolaan keuangan desa tersebut akan disampaikan melalui laporan pertanggungjawabkan keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan mengenai desa ialah komponen laporan pertanggung jawaban (LPJ) mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan serta belanja desa (APBDes), yang wajib dilaporkan kepala desa secara berkala. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pertanggung jawaban keuangan yang harus dibuat dan dilaporkan oleh desa berupa catatan atas laporan keuangan desa (CaLK) (Sukmawati, 2017; Prayudi et al., 2018).

Sampai sekarang masih terdapat desa yang belum optimal dalam mengelola dana desa. Terdapat permasalahan dalam anggaran dana desa di Kabupaten Karangasem yaitu adanya sejumlah desa yang serapan dana desanya masih rendah. Terdapat 28 desa yang serapan dana desanya masih dibawah 75%, dan ada beberapa desa yang dana serapan desanya baru 16%. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karangasem, menyatakan bawasannya serapan dana desa yang rendah banyak terjadi di Kecamatan Rendang dan Karangasem yaitu sebanyak 5 desa, Kecamatan Manggis dan Kubu sebanyak 2 desa, Kecamatan Abang dan Bebandem 3 desa, dan 4 Kecamatan Sidemen sebanyak 8 desa. Peneliti juga menemukan permasalahan yang masih terjadi di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem melalui wawancara dengan staf keuangan desa, terdapat permasalahan bahwa Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem masih mengalami permasalahan dalam hal administrasi, karena belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah ditetapkan, dimana sebagian besar pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desanya hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan tidak menyusun catatan atas laporan keuangan desa (CaLK).

Aspek pertama yang bisa disebut sebagai faktor indikasi yakni Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SAK). Sistem akuntansi keuangan desa menurut (V. Wiratna Sujarweni, 2014) mengatakan bahwa akuntansi desa adalah proses pencatatan transaksi keuangan desa terkait segala transaksi yang menggunakan dana desa didukung dengan adanya bukti transaksi untuk menghasilkan output laporan keuangan. Penelitian Oktavia & Rahayu, 2019 dan Jauhari & Hazisma, 2021 menyatakan bawasannya sistem akuntansi keuangan daerah

mempunyai pengaruh positif serta signifikan bagi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil riset ini berbanding terbalik dengan penelitian Erawati & Abdulhadi (2019) menyimpulkan bawasannya pemahaman sistem keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Aspek ke-2 yang bisa dianggap sebagai faktor indikasi ialah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dengan mempunyai kualifikasi di bidang akuntansi/keuangan. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan kesiapan-kesiapan, salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia (Kusumawardhani, 2020). Penelitian Ratih (2018) dan Zubaidi et al. (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian (Kusumadewi, 2020) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan, tugas dan wewenang kepala desa, maka kepala desa dan pengurus desa harus mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dengan bekerja sama dengan semua pihak terkait di desa, misalnya seperti BPD, lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK, Karang Taruna) dan masyarakat desa itu sendiri. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan turut serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan pemerintah kota dan desa serta mengawasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya anggota BPD turut berperan dalam keberhasilan dan kegagalan perangkat desa dalam peran kepemimpinannya dalam pemerintahan desa. Penelitian (Ratih, 2018), yang menyatakan bawasannya peran BPD juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Namun berbeda dengan penelitian dari Wahyudi (2021), mengatakan bahwa peran BPD tidak mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem masih menghadapi kendala dalam hal administrasi, karena belum bisa menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan tersebut berhubungan dengan teori keagenan. Teori keagenan adalah hubungan yang didasarkan oleh suatu kontrak dimana satu atau lebih pihak (*principal*) untuk memberikan tugas kepada pihak lain (agen) untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam pengambil keputusan (Jensen & Meckling, 2019). Teori agensi dalam pelaporan keuangan desa berkaitan dengan hubungan antara agen (pemerintah desa) dan prinsipal (masyarakat desa). Oleh karena itu, keselarasan hubungan kedua pihak tersebut dapat dibentuk melalui proses pelaporan keuangan yang baik.

Kualitas laporan keuangan dalam konteks pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kualitas dari sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, serta adanya kontrol atau pengawasan (Ratih, 2018; Wahyudi, 2021). Namun, penelitian yang mengkaji sejauh mana pengaruh implementasi sistem akuntansi di berbagai desa memengaruhi kualitas laporan keuangan belum banyak dieksplorasi dengan mempertimbangkan faktor kapasitas sumber daya manusia dan fungsi pengawasan dari BPD. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan, serta adanya celah riset yang teridentifikasi maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi aparatur desa, dan peran BPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Karangasem.

Upaya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, setiap substansi harus mempunyai kemampuan untuk membuat laporan keuangan sesuai pada umumnya norma atau pedoman yang diakui, sebagai salah satu syarat dalam memberikan laporan keuangan yang berkualitas dan baik pada suatu organisasi. Pemerintah desa yang telah menerapkan

sistem akuntansi keuangan desa dengan baik, akan mempermudah penyusunan laporan keuangan serta laporan pertanggung jawaban yang disajikan sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia & Rahayu, 2019) dan (Kusumadewi, 2020) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan desa mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan bagi kualitas laporan keuangan desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Rahayu (2019), yang menyatakan bahwasanya sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif bagi kualitas laporan keuangan daerah. Desa tersebut juga sebanding dengan penelitian dari Hadi Jauhari, (2021), menyatakan bahwasanya sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadewi, 2020) juga menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan desa mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan bagi kualitas laporan keuangan desa. Berdasarkan pemaparan tersebut, sehingga dapat di susun hipotesis, yakni:

H1: Sistem Akuntansi Keuangan Desa berpengaruh positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Kompetensi aparatur desa sangat memiliki pengaruh dalam penyusunan serta pertanggung jawaban laporan keuangan entitas. Peningkatan kompetensi aparatur desa dalam penyajian laporan keuangan desa akan sangat penting, karena mengingat pengalokasian dana desa yang semakin meningkat serta pentingnya pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zubaidi et al. (2019) dan Ratih (2018) bahwasanya kompetensi sumber daya manusia mempunyai hubungan yang positif dan signifikan bagi kualitas laporan keuangan. Artinya, meningkatkannya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM. Sedangkan penelitian Triwahyuni (2016), mengatakan bahwa kompetensi SDM tidak mempunyai pengaruh bagi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Peran BPD dalam penyelenggaraan desa baik dalam pengelolaan maupun penatausahaan sumber daya desa sangat erat kaitannya dengan tercapai atau tidaknya tujuan pemerintah desa. Auditor internal dewan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dibentuk sebagai badan independen dan objektif dengan tujuan menciptakan nilai dan meningkatkan kualitas pemerintah desa. BPD dapat membantu pemerintah desa dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mempertanggungjawabkan dan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan dan kemajuan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ratih, 2018) dan Suherman dan Susanti (2017) menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Wahyudi dan Hasri (2021), mengatakan bahwa peran BPD tidak mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yaitu:

H3: Peran Badan Permusyawaratan Desa Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Kantor Desa Se-Kecamatan Karangasem. Penelitian ini melibatkan tiga variabel bebas yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Desa, dan Peran BPD. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas laporan keuangan. Metode penentuan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik Sampling Jenuh. Perangkat Desa yakni Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara dan Anggota BPD sehingga jumlah responden sebanyak 34 orang. Teknik sampling non probabilitas sampling digunakan dalam penelitian ini dan semua populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2017).

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang menghasilkan data ordinal dan diukur dengan menggunakan skala interval antara nilai 1 sampai dengan 5 dengan rentang jawaban sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Hasil penyebaran kuesioner ini dianalisis dengan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Adapun beberapa pengujian yang dilakukan adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian lainnya adalah melakukan uji asumsi klasik berupa uji multikolinieritas dimana uji asumsi klasik multikolinieritas ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui ada atau tidak korelasi antara variabel bebas.

Setelah uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat atau yang disebut dengan nilai determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *R Square* dan *R Square Adjusted*. Langkah terakhir yaitu berupa pengujian hipotesis penelitian dengan dibandingkan nilai t-statistik dan nilai t-tabel dengan asumsi bahwa hipotesis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pada penelitian ini meliputi hasil uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji statistik deskriptif merupakan teknik statistik yang bertujuan untuk menggambarkan data dengan singkat agar informasi pentingnya dapat dipahami. Dengan menggunakan metode ini, data dapat disusun, diproses, dan dijelaskan sehingga lebih mudah dipahami.

Tabel. 1
Uji Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Akuntansi Keuangan	34	21.00	40.00	32.8235	6.73512
Kompetensi Aparatur Desa	34	15.00	30.00	24.1765	4.23170
Peran BPD	34	16.00	30.00	25.5294	3.62847
Kualitas Laporan Keuangan	34	15.00	25.00	20.7647	3.00564
Valid N (listwise)	34				

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 1. Data Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Peran BPD dan Kualitas Laporan Keuangan memiliki standar deviasi dengan skor lebih kecil dari pada skor rata-rata yang berarti bahwa penyebaran data semua variable pada penelitian ini berdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh atau tinggi. Uji kualitas data merupakan proses yang digunakan dalam penelitian untuk menilai sejauh mana alat ukur atau instrument yang digunakan dalam penelitian tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Item pernyataan dikatakan valid jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka instrument dinyatakan valid. Pernyataan memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga butir-butir pernyataan dinyatakan valid. Uji Reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi setiap jawaban responden. Jika koefisien Cronch Alpha $> 0,70$ maka dikatakan reliable. Berdasarkan hasil pengujian pada setiap varible menunjukan nilai Cronch alpha diatas $0,70$ sehingga dapat disimpulkan seluruh kuisisioner adalah reliabel. Hasil uji normalitas menggunakan One Test Kolmogorov Smirnov test dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200$. Hal ini berarti nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari $0,05$ sehingga dalam hal ini dapat dikatakan berdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Uji

Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada masalah Multikolinieritas dalam model regresi. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat dari nilai tolerance dari sistem akuntansi keuangan desa (X1), kompetensi aparatur (X2) dan peran BPD (X3) yaitu 0.858-0.951 yang artinya lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel yaitu sebesar 1,051- 1.166 yang artinya nilai tersebut di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

Tabel 2
Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.335	2.264		1,749	0,311		
Sistem Akuntansi Keuangan Desa	0.406	0.035	0.910	11.68	0,000	0.951	1.051
Kompetensi Aparatur Desa	0.086	0.058	0.122	3.483	0,003	0.858	1.166
Peran BPD	0.118	0.066	0.142	3.776	0,003	0.898	1.114

Sumber: Hasil Pengujian Output SPSS

Tabel 3
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.335	2.264		1,031	0,311
Sistem Akuntansi Keuangan Desa	0.406	0.035	0.910	11.682	0,000
Kompetensi Aparatur Desa	0.086	0.058	0.122	3.483	0,003
Peran BPD	0.118	0.066	0.142	3.776	0,003

Sumber: Hasil Pengujian Output SPSS

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas. Berdasarkan hasil uji diatas mengacu pada Unstandardized Coefficients Beta, yang dapat dinyatakan dengan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = 2.335 + 0.406 X_1 + 0.086 X_2 + 0.118 X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa Konstanta sebesar 2.335 menunjukkan jika variabel sistem akuntansi keuangan desa (X1), kompetensi aparatur (X2) dan peran BPD (X3) bernilai konstan, maka variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai 2.335 satuan. Nilai koefisien variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X1) sebesar 0.406 bertanda positif berarti bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X1) memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Sehingga dari hasil koefisien regresi variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X1) sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kualitas Laporan Keuangan (Y) juga nantinya akan meningkat sebesar 0.406. Nilai koefisien variabel Kompetensi Aparatur Desa (X2) sebesar

0.086 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara variabel Kompetensi Aparatur Desa (X2) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y). Jika setiap variabel Kompetensi Aparatur Desa mengalami peningkatan, maka Kualitas Laporan Keuangan juga akan meningkat sebesar 0.086 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien Peran BPD (X3) sebesar 0.118 bertanda positif berarti bahwa variabel Peran BPD (X3) memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Sehingga dari hasil koefisien regresi variabel pada penelitian ini, jika terjadi peningkatan pada variabel Peran BPD (X3) sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kualitas Laporan Keuangan (Y) juga nantinya akan meningkat sebesar 0.118.

Uji t adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi tersebut berbeda secara signifikan dari nol (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil uji t dapat diinterpretasikan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X1) diperoleh nilai probabilitas signifikansi t sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan B bertanda positif sebesar 0.406 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X1) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X2) diperoleh nilai probabilitas signifikansi t sebesar 0,003 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan B bertanda positif sebesar 0.086 yang berarti H0 ditolak dan H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Desa (X2) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Variabel Peran BPD (X3) diperoleh nilai probabilitas signifikansi t sebesar 0,003 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan B bertanda positif sebesar 0.118 yang berarti H0 ditolak dan H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Peran BPD (X3) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Tabel 4.
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.909	.827	.810	1.31171

- Predictors: (constant), Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Desa dan Peran BPD
- Dependent Variabel: Kualitas Laporan Keuangan

Koefisien determinasi, sering disebut sebagai R-squared (R^2), adalah ukuran statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi sejauh mana variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada dalam model. Berdasarkan tabel 4, Uji koefisien determinan R^2 menunjukkan hasil nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) bahwa nilai R^2 yang dimiliki oleh semua variabel memiliki nilai .810 atau dapat disimpulkan bahwa nilai Adjusted R Square pada seluruh variabel ini adalah 81%.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X1) diperoleh nilai probabilitas signifikansi t sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan B bertanda positif sebesar 0.406. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Desa memiliki tanda positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Karangasem. Tanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Sistem Akuntansi Keuangan Desa yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, semakin tinggi pula kualitas laporannya.

Hasil penelitian dihubungkan dengan teori keagenan (agency theory) yaitu variabel sistem akuntansi keuangan. Dimana dalam organisasi desa, pihak principal pada pemerintah desa yaitu masyarakat sedangkan untuk pihak agent pada pemerintah desa yaitu perangkat

desa. Hubungan antar pihak tersebut di dasari oleh prinsip kerjasama dan inderpendensi antar kedua pihak. Hubungan antar pihak tersebut di dasari oleh prinsip kerjasama dan inderpendensi antar kedua pihak. Dalam hal ini presepsi tentang sistem akuntansi keuangan dalam pembuatan laporan keuangan yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, oleh karena itu pelaporan keuangan berperan penting dalam menyediakan informasi yang relevan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Rahayu (2019); Jauhari & Hazisma (2021); dan Kusumadewi (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan desa mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan bagi kualitas laporan keuangan desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Kompetensi Aparatur Desa (X2) diperoleh nilai probabilitas signifikasi t sebesar 0,003 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan B bertanda positif sebesar 0.086. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Karangasem. Sehingga semakin tinggi tingkat Kompetensi Aparatur Desa yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Keterkaitan kompetensi aparatur desa dengan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan melalui teori keagenan (agency theory). Teori ini mendeskripsikan keterkaitan agent dimana pihak agent pada pemerintah desa yaitu aparat desa yang harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selaku principal. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa diwajibkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, demi mempermudah pihak principal (masyarakat) untuk membuat keputusan. Jika kompetensi aparatur desa dimiliki berkompeten maka akan memudahkan pemerintah desa dalam menerapkan standar akuntansi yang telah diberlakukan sehingga dihasilkanlah laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zubaidi et al. (2019) dan Ratih (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa mempunyai pengaruh bagi peningkatan kualitas laporan keuangan desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peran BPD (X3) diperoleh nilai probabilitas signifikasi t sebesar 0,003 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan B bertanda positif sebesar 0.118. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peran BPD (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Karangasem. Sehingga semakin tinggi tingkat Peran BPD yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Adanya keterkaitan antar variabel peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap kualitas laporan keuangan pada penelitian ini dapat dihubungkan dengan teori keagenan (agency theory). Dalam organisasi desa, pemerintah desa merupakan pihak agen (manager) yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan yang ditugaskan oleh pihak principal serta menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa. Dimana BPD merupakan pihak agent yang nantinya akan melakukan pengawasan. Peran Badan Permusyawaratan Desa akan dapat membantu pemerintah desa dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah desa dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas dan handal untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratih (2018); dan Suherman dan Susanti (2017); menyatakan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan yaitu sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi aparatur desa, peran BPD memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ketiga faktor

tersebut penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu pertama bagi desa diharapkan untuk dapat terus meningkatkan penerapan sistem akuntansi keuangan desa serta selalu menerapkan peraturan yang berlaku sebagai panduan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga terciptanya laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Bagi aparatur desa disarankan untuk lebih mengembangkan kemampuannya dengan sering melakukan pelatihan dan pendidikan dalam bidang keuangan yang nantinya dapat membantu aparat desa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai bidang dan diharapkan dapat menerapkan materi tersebut serta metode pelatihan agar tujuan organisasi yang sudah di rancang dapat tercapai. Bagi penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil dan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan pada seluruh pemerintah desa, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah pencakupan sampel, menggunakan variable yang berbeda antara lain sistem akuntansi keuangan, kompetensi aparatur desa, dan peran BPD yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini, karena hasil nilai adjust R Squared penelitian yang telah dilakukan yaitu 0,810 atau 81% dan sisanya sejumlah 19% dipengaruhi oleh variable lainnya.

Daftar Rujukan

- Erawati, T., & Abdulhadi, M. F. (2018). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Akmenika*, 15(1), 67–78.
- Jauhari, H., & Hazisma, S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 104-121.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.
- Kusumadewi, R. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Perangkat Desa Se Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 106– 132. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v1i2.887>
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155-2182.
- Oktavia, S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Manajemen*, 6(1), 652–659.
- Prayudi, M. A., Dewi, G. A. K. R. S., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2018). Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449-467.
- Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 423–432. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3093>

- Rahmah, K., & Zulkifli, Z. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis AkruaL Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 26(2), 113–130. <https://doi.org/10.32477/jkb.v26i2.273>
- Ratih, A. E. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Peran Serta BPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Teluk Sebong dan Teluk Bintan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 2(1), 65-78.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmawati, A. (2017). Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan, tingkat pendidikan, masa kerja dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada satker kanwil kementerian agama propinsi sulawesi tengah). *Jurnal Katalogis*, 5(5), 157–168.
- Triwahyuni, M. (2016). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (Studi pada pemerintah daerah Kota Dumai). *JOM Fekon*, 3(1), 2312–2326. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/11889>
- Wahyudi, A., & Hasri, D. A. (2021). Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dan Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Maneksi*, 10(1), 43–47. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i1.649>
- Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 68-76.